

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan hipotesis. Penulisan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel yang akan diteliti dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas mengenai kerangka berpikir yang menjelaskan tentang model serta hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, kemudian diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006, hlm. 29) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari periode ke periode selanjutnya dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Sedangkan menurut Jhingan (2004, hlm. 57) dalam Dwi Cahya (2018, hlm. 11) pertumbuhan ekonomi sebagai kenikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu analisa mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor

yang menentukan pertumbuhan itu sendiri Sukirno (2006, hlm. 432). Berikut teori pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini:

a. Teori pertumbuhan klasik

Dalam pandangan ekonom klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Walaupun terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya terhadap pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik menyebutkan bahwa apabila hasil tambang suatu negara semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini dapat diartikan pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung secara terus menerus. Permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam melimpah, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terjadi terus menerus berlangsung jika penduduknya sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk menjadi negatif.

b. Teori Schumpeter

Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara

memproduksi dalam menghasilkan barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang ada dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

Pada keadaan waktu tertentu, para pengusaha menyadari adanya berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong dari keinginan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi negara sekaligus pendapatan masyarakat akan bertambah dan konsumsi masyarakat juga ikut bertambah. Menurut Schumpeter dalam Sandono Sukirno (2006, hlm. 434) investasi dibagi menjadi dua, yaitu: penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul dari kegiatan inovasi.

c. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

Dalam pandangan ini dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana : ΔY : tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK : tingkat pertumbuhan modal

ΔL : tingkat pertumbuhan penduduk

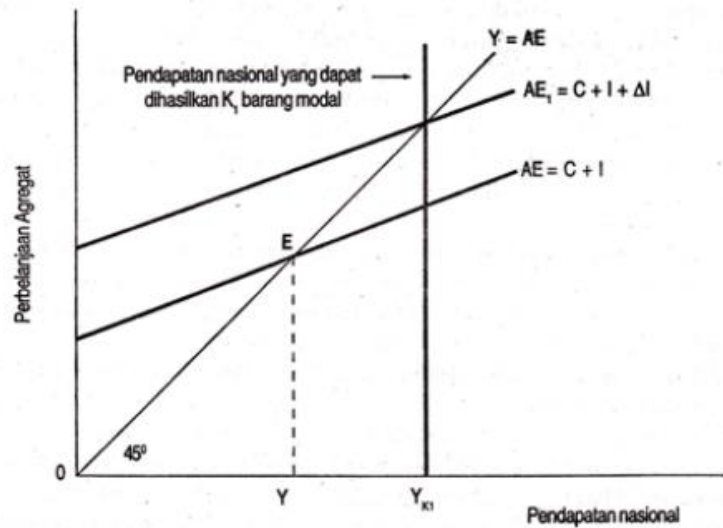
ΔT : tingkat perkembangan teknologi

Menurut analisis Solow dalam Sadono Sukirno (2006, hlm. 437) selanjutnya membentuk persamaan tersebut dan selanjutnya membuat pembuktian secara empiris untuk menunjukkan kesimpulan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah dari penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Melainkan kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan keahlian tenaga kerja.

d. Teori Harrod-Domar

Dalam teori ini bertujuan untuk menerangkan kondisi yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan permisalan sebagai berikut (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal-produksi (*capital-output rasio*) tetap nilainya dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam analisis Harrod-Domar menunjukkan walaupun pada suatu tahun tertentu (misalkan tahun 2005) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat pada tahun tersebut yaitu $AE = C + I$ akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan kata lain investasi yang berlaku pada tahun 2005 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun tersebut.



Gambar 2.1 Teori Harrod-Domar: Peranan Investasi Dalam Pertumbuhan.

Sumber : Sadono Sukirno, Macroeconomics Teori Pengantar, (2006).

Masalah yang diungkapkan oleh Harrod-Domar ditunjukkan pada gambar 2.1 pengeluaran agregat yang mulanya adalah $AE = C + I$. keseimbangan dicapai pada titik E yang menggambarkan (i) pendapatan nasional adalah Y dan (ii) dalam pendapatan nasional tersebut ekonomi mencapai kapasitas penuh. Misal jumlah barang modal pada keseimbangan ini adalah K_0 lalu dalam teori Harrod-Domar menerangkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun tersebut (2005) akan menyebabkan jumlah barang modal bertambah pada tahun berikutnya (2006), yaitu jumlah barang modal menjadi $K_1 = K_0 + I$, dimana K_1 adalah jumlah barang modal pada tahun 2006. Agar sepenuhnya barang modal digunakan, pengeluaran agregat pada tahun itu harus mencapai $AE_1 = C + I + \Delta I$. dengan pengeluaran agregat ini pendapatan nasional adalah Y_{K1} dan nilai ini sama dengan kapasitas barang modal sebanyak K_1 untuk menghasilkan pendapatan nasional yang mana kapasitas penuh tercapai kembali. Analisis ini menunjukan

dalam ekonomi dua sektor, investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Dalam contoh diatas, pada tahun 2005 investasi adalah sebesar I dan pada tahun 2006 investasi perlu meningkat menjadi $(I + \Delta I)$.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006, hlm. 429-432) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Didalam setiap negara pertumbuhan ekonomi pada tahap mengalami banyak rintangan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan membuat nilai tenaga kerja terus meningkat dan pertambahan tersebut memungkinkan negara tersebut untuk menambah jumlah produksi. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan terus menurun.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting dalam menaikkan keefisienan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang kurang maju sekalipun besar peranan barang modal dalam kegiatan perekonomiannya. Teknologi juga memiliki beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi yang efek utamanya adalah (i) mempertinggi keefisienan suatu barang (ii) menimbulkan penemuan barang-barang baru dan kemajuan seperti ini menambah barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat (iii) meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga

d. Sistem sosial dan masyarakat

Sikap masyarakat juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Sikap yang dimaksud antara lain adalah sikap bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, memiliki sikap hemat dengan tujuan mengumpulkan lebih banyak uang untuk berinvestasi serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Adisasmita (2013, hlm. 103) dalam Dhita Nur (2016, hlm. 23-28) para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat atau menurun merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Berikut adalah beberapa faktor produksi yang terdiri dari:

a. Sumber daya alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam (utamanya tanah). Tersedianya sumber daya alam yang potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar, sumber

daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan selebihnya dipasarkan keluar wilayah. Semakin banyak dan semakin luas pasar yang dilayani untuk berbagai komoditas yang dihasilkan adalah semakin baik dan menguntungkan.

b. Akumulasi modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal memiliki makna masyarakat tidak melakukan kegiatan pada saat ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi juga untuk membuat barang modal, alat-alat perlengkapan, mesin, pabrik, dan lainnya. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan output riil.

Menurut Kuznets dalam Dhita Nur (2016, hlm. 25) rasio modal marginal ICOR (*incremental capital output ratio*) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. ICOR menggambarkan produktivitas modal, yang mana dalam negara-negara berkembang nilai ICOR relatif rendah dikarenakan kurangnya modal dan rendahnya kapasitas produksi. Meski demikian, laju pertumbuhan modal dapat dipercepat dengan mendorong tabungan yang selanjutnya disalurkan kepada investasi.

c. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern,

para wirausaha tampil sebagai organisator dan mengambil resiko dalam menghadapi ketidak pastian. Di negara-negara berkembang jumlah wirausahawan tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan sempitnya pasar, kurang modal, kurangnya pelatihan pada tenaga kerja serta infrastruktur yang kurang mendukung.

d. Kemajuan teknologi

Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi yang lainnya. Menurut Simon Kuznets (1871) dalam Dhita Nur (2016, hlm. 26-27) terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yakni penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan. Inovasi terbagi menjadi dua macam, yaitu penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk dan pembaharuan yang menciptakan permintaan baru akan produk tersebut.

e. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produksi. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membatu perkembangan industri. Menurut Adam Smith (1776) dalam Dhita (2016, hlm. 27) menyatakan pentingnya arti pembagian kerja (*division of labor*) bagi perkembangan ekonomi, pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi ekonomi, pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi buruh.

2.1.2 Aglomerasi Industri

2.1.2.1 Definisi Aglomerasi Industri

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki persebaran dari Pulau Sumatra hingga Papua, hal ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berbeda-beda. Selaras dengan konsep Perroux tentang aglomerasi yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di semua tempat.

Menurut Kuncoro (2002, hlm. 26) dalam Ravindra (2014, hlm. 25) dalam aglomerasi merupakan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan karena penghematan dari perusahaan yang saling berdekatan akibat dari kalkulasi perusahaan secara individual.

2.1.2.2 Teori Aglomerasi

1. Teori Neo-Klasik

Menurut Kuncoro (2002, hlm. 26) dalam Dwi Cahya (2018, hlm. 31-32) aglomerasi muncul dari para pengusaha yang berlomba mencari keuntungan dengan hadirnya ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Aglomerasi ini mencerminkan adanya hubungan antar pelaku ekonomi yang sama: apakah antar perusahaan antara industri yang sama, antar perusahaan antara industry yang berbeda ataupun antar perusahaan, individu, dan rumah tangga. Di sisi lain, kota merupakan suatu daerah dengan macam-macam keanekaragaman yang menyuguhkan manfaat kedekatan lokasi konsumen maupun produsen.

2. Teori Ekonomi Geografi Baru (The New Economic Geography)

Menurut Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar (2007, hlm. 120) Teori ekonomi geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi

antara besarnya pasar, biaya transportasi dan increasing return dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi. Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Martin & Ottaviano, 2001).

Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya intermediate good pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antarperusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.

3. Teori Eksternalitas Dinamis

Menurut Glaezer (1992) dalam Jamzani Sodikin (2007, hlm. 119) Teori ini mempercayai kedekatan geografis memudahkan transmisi ide dengan menyalurkan teknologi merupakan hal yang penting bagi kota. Teori ini dicetuskan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob yang mana ingin menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa tumbuh.

Eksternalitas yang dianut MAR meutamakan penyaluran pengetahuan antar perusahaan dalam suatu bidang industri. Menurut MAR monopoli lokal adalah hal yang lebih baik jika dibandingkan dengan kompetisi lokal yang menyebabkan penghambat aliran ide dari industri lain dan eksternalitas diinternalisasi oleh investor.

2.1.2.3 Faktor Penentu Aglomerasi

Letak perindustrian yang cenderung berpusat pada perkotaan menjadikan wilayah tersebut memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mendapatkan manfaat dari lokasi industri yang berdekatan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri :

a. Skala Ekonomi

Menurut Tarigan (2005), skala ekonomi merupakan faktor produksi yang tidak bisa dibagi (*indivisibility*). Dampak dari skala ekonomi sendiri yaitu ketersediaan fasilitas yang mempermudah kegiatan perusahaan, contohnya transportasi, keamanan, perbankan, perusahaan listrik, perusahaan air, dan lainnya.

b. Pendapatan per kapita

Lokasi terhadap berdirinya sebuah industri memiliki keuntungan untuk meningkatkan konsentrasi terhadap pasar-pasar besar, selain itu semakin padatnya sebuah penduduk dilokasi tersebut akan menarik konsentrasi terhadap produksi manufaktur. Pada daerah yang kepadatan penduduknya cukup tinggi akan mendapat pendapatan yang rata-rata relatif tinggi serta akan mempengaruhi permintaan dan meningkatkan penawaran barang konsumtif dan menciptakan industri-industri baru untuk mencukupi pasar.

c. Biaya tenaga kerja

Tingkat upah dan keahlian tenaga kerja akan membuat terjadinya konsentrasi spasial, adanya pengelompokan perusahaan maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja yang besar. Fenomena tersebut disebabkan karena pemberian upah pada kota-kota industri lebih layak dibandingkan di daerah tertinggal. Biaya tenaga kerja merupakan faktor kedua yang mempengaruhi lokasi industri, hal ini terjadi karena penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi tidak sebesar biaya tambahan transportasi per unit produksi karena peralihan lokasi dekat dengan sumber tenaga kerja.

2.1.2.4 Perhitungan Aglomerasi

Untuk menghitung nilai aglomerasi dengan menggunakan indeks ballasa memerlukan data jumlah tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam satu provinsi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Ballasa : } \frac{\frac{\sum_{ij} E_{ij}}{\sum_j E_{ij}}}{\frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}}}$$

Keterangan :

\sum_{ij} = Total tenaga kerja sektor industri tingkat Kab/Kota

$\sum_j E_{ij}$ = Total tenaga kerja tingkat Kab/Kota

$\sum_i E_{ij}$ = Total tenaga kerja sektor industri Nasional

$\sum_i \sum_j E_{ij}$ = Total tenaga kerja tingkat Nasional

Menurut Sbragami (2002, hlm. 6) dalam Dwi Cahya (2018, hlm. 40) pernyataan semakin terpusat suatu industri, maka semakin besar indeks ballasanya. Tingkat aglomerasi dibedakan menjadi empat, yakni: i) kuat apabila angka ballasa diatas 4, ii) rata-rata atau sedang berada dinilai antara 2 sampai 4, iii) dikatakan lemah apabila angka dalam indeks ballasa diantara 1 sampai 2, iv) tidak terjadi aglomerasi apabila angka indeks ballasa antara 0 sampai 1.

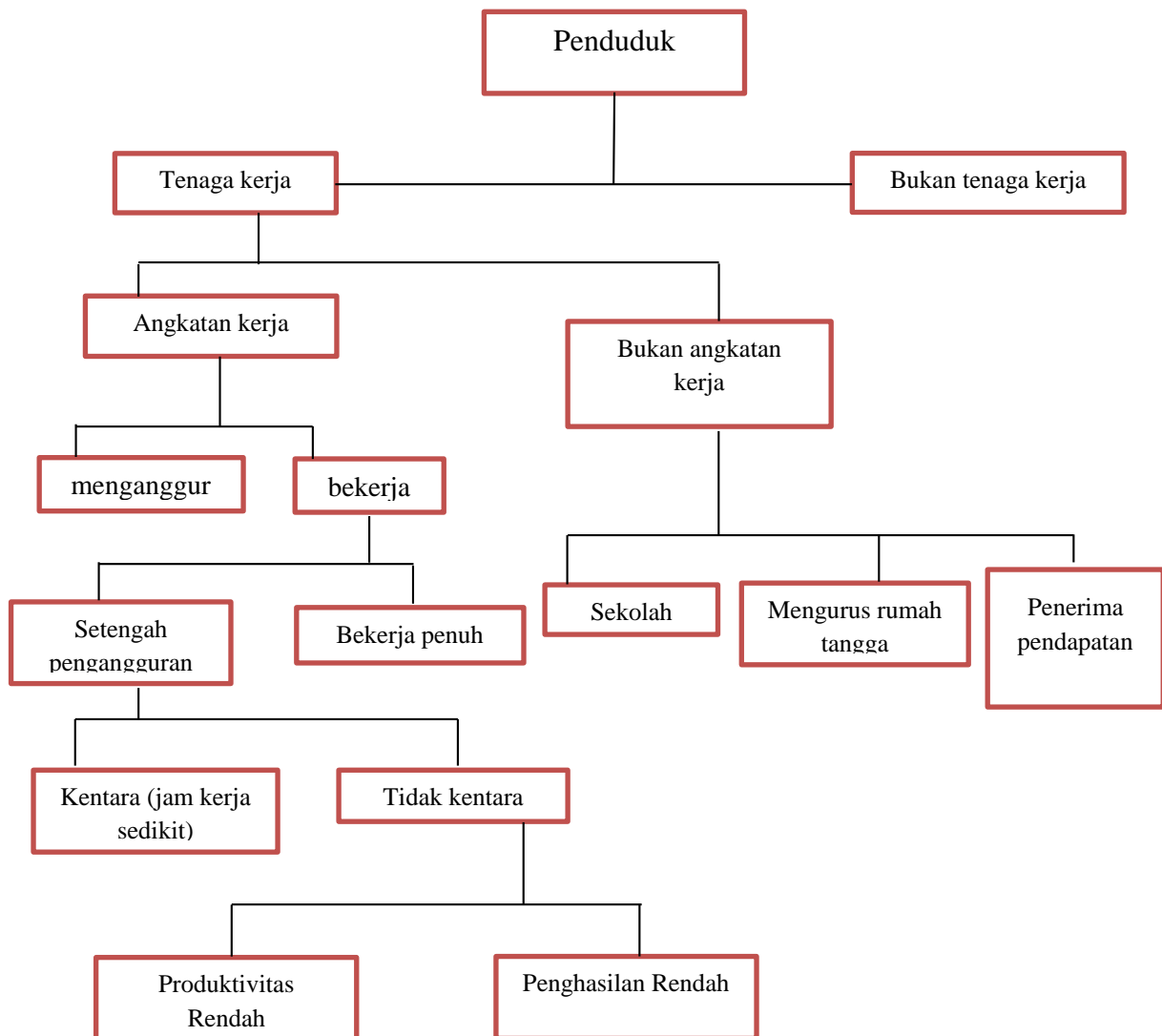
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.1.3.1 Definisi Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Payaman Simanjuntak (2001, hlm. 36) dalam Ravindra (2014, hlm. 30) dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang memberikan ilustrasi yang jelas sejauh mana penduduk yang masuk ke dalam usia kerja benar-benar aktif dan tidak aktif dalam bekerja. Secara singkatnya TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja.

Penduduk dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dalam Bab I menyatakan tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu bekerja dan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan maksud memenuhi kebutuhan dirinya maupun untuk masyarakat luas. Yang termasuk kedalam golongan tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Batas usia yang membedakan tenaga kerja atau bukan tenaga kerja. Bank Dunia menyebutkan batas usai kerja adalah 15 tahun ke atas. Indonesia sendiri memiliki batasan pada usia kerja yaitu dari 10 tahun keatas (1971-1999). Maksud dari pemilihan usia 10 tahun tersebut dikarenakan bahwa di daerah pedesaan banyak yang sudah bekerja mulai dari usia 10 tahun. Pada tahun 2001 Indonesia mulai mengikuti saran dari *Internasional Labour Organizartion (ILO)* yaitu dengan mengubah batas minimum usia tenaga kerja dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Berikutnya, angkatan kerja menjadi salah satu faktor positif dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak partisipasi angkatan kerja yang bekerja akan meningkatkan tingkat produksi yang akhirnya memberikan dampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa kelompok dalam angkatan kerja, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.



Gambar 2.2 Bagan Tenaga Kerja

Sumber: simanjuntak, (1998).

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang berusaha untuk terlibat kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja dan golongan menganggur serta mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari kerja.

Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lainnya atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. maka dari itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial. Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja.

Angkatan kerja dibedakan menjadi dua golongan kelompok yaitu bekerja dan menganggur. Pekerja adalah orang yang bekerja, mencakup orang mempunyai pekerjaan dan yang sedang bekerja serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja digolongkan kedalam pekerja apabila waktu minimum bekerja yaitu selama satu jam selama seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan menganggur minimal satu jam selama seminggu yang lalu sebelum dilakukan pencacahan.

Perumusan dalam TPAK yaitu persentase atas banyaknya penduduk yang bekerja dengan banyaknya penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) usia kerja diindikasikan pada usia 15 tahun ke atas. Dengan ini untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{PK}{PUK} \times 100\%$$

Dimana: PK = Penduduk yang bekerja

PUK = Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

a. Jumlah penduduk bersekolah dan mengurus rumah tangga

Hubungan TPAK dan jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga adalah semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin kecil jumlah angkatan kerja.

b. Tingkat Umur

Usia berkaitan dengan TPAK. Semakin banyak usai produktif pada suatu negara akan menghasilkan penerus yang kreatif dan mampu membawa tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara.

c. Upah

Semakin tinggi tingkat upah di suatu daerah, membuat penduduk usia kerja di daerah tersebut tertarik untuk masuk ke dalam pasar kerja, secara tidak langsung TPAK juga akan meningkat.

2.1.4 Tingkat Upah

2.1.4.1 Definisi Tingkat Upah

Upah adalah gaji bersih yang diterima oleh pekerja selama sebulan kerja baik dalam bentuk uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah bersih yang dimaksud adalah hasil setelah dikurangi dengan potongan-potongan, pajak penghasilan, iuran wajib, dan lainnya oleh pihak perusahaan/kantor/majikan (BPS, 2017). Menurut Sumarsono (2009,

hlm. 151) upah merupakan suatu penerimaan imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar peraturan undang-undang serta dibayarkan atas perjanjian kerja antar karyawan dengan pengusaha termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36. Tahun 2021 dalam menetapkan upah minimum, Gubernur di setiap daerah wajib menetapkan upah minimum Provinsi yang mana dalam penyusunannya menyesuaikan nilai upah minimum yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pengupahan nasional, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengirimkan usulannya kepada Walikota/Bupati dan diteruskan kepada Gubernur di tingkat Provinsi.

Peraturan Pemerintah dalam pengupahan tersebut memberikan formula baru untuk Provinsi menghitung upah minimum pada setiap tahunnya. Formula baru ini mengharuskan upah minimum disesuaikan berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum sektoral Provinsi juga menegaskan Gubernur dapat menetapkan tingkat upah minimum sektoral Kabupaten/Kota atas kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Disimpulkan dengan ini bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Maka dari itu upah harus mencukupi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar, Kewajaran dapat dilihat dan diukur dengan Kebutuhan

Hidup Minimum (KHM) sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Gubernur di setiap daerah. Menurut Sumarsono (2009, hlm. 151) pengupahan di Indonesia didasarkan dalam tiga fungsi, yakni: 1) jaminan kehidupan yang lebih layak bagi karyawan dan keluarganya; 2) merepresentasikan imbalan atas hasil kerja seseorang; 3) menyediakan bonus guna meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.

2.1.4.2 Teori Upah

1. Teori Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas

Menurut Andi M Ramly (2004, hlm. 152) Ajaran Karl Marx mengatakan hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang bergantung kepada nilai jasa dari para buruh atau jumlah waktu bekerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Ajaran Karl Marx didasari teori nilai dan asas pertentangan kelas. Teori nilai pada mulanya hanya buruh yang menjadi sumber nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang digunakan dalam memproduksi barang.

Dalam teori pertentangan kelas Karl Marx meyakini adanya pertentangan kepentingan antar kaum buruh dan kapitalis. Kaum kapitalis selalu berusaha membuat barang-barang modal untuk mengurangi jumlah buruh yang mengakibatkan bertambahnya penawaran di pasar kerja sehingga upah yang diterima menurun. Akibatnya dari sistem seperti ini tidak ada jalan lalin bagi buruh kecuali bersatu merebut kapital dari para penguasaha menjadi milik bersama.

Keterkaitan pandangan Karl Marx dalam sistem pengupahan dan pelaksanaannya yakni:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi tiap orang, dalam jenis dan jumlah yang hampir sama. Begitu juga nilai setiap barang menjadikan tingkat upah tiap-tiap orang sama.
- b. Sistem pengupahan tidak memberikan bonus guna menjamin peningkatan produktifitas kerja dan pendapatan nasional.
- c. Sistem control yang ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang benar-benar bekerja menurut keahliannya.

2. Teori Upah Menurut Pertumbuhan Produk Marginal

Menurut Ahmad Supardi (2021, hlm. 27) teori Neo-Klasik menyatakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi dengan sedemikian rupa, sehingga tiap faktor produksi yang digunakan untuk menerima atau memberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Dengan ini dapat diartikan perusahaan memperkerjakan sejumlah karyawan dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil nilai pertambahan dari hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu:

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

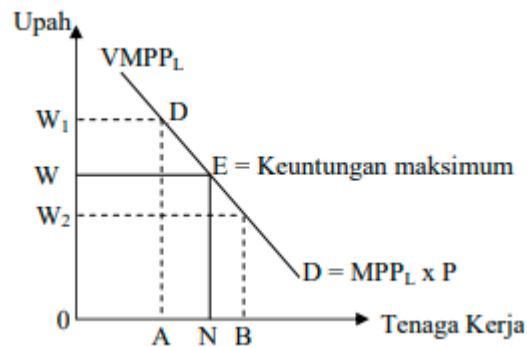
Dimana =

W = Tingkat upah (*Labour Cost*) yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan.

P = Harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah/ unit barang.

MPP_L = *Marginal physical of labour* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang atau unit waktu.

$VMPP_L$ = *Value of marginal physical product of labour* atau nilai pertambahan hasil marjinal pekerja.



Gambar 2.3 Fungsi Permintaan Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek

Sumber: Bellante (1990) dalam Oktaviana Dwi Saputri (2011, hlm. 15)

Menurut Oktaviana Dwi Saputri (2011, hlm. 15) Pada gambar diatas 2.3 mendeskripsikan mengenai fungsi permintaan tenaga kerja terhadap upah minimum. Fungsi permintaan pada gambar diatas dapat berbeda untuk setiap perusahaan hal ini dikarenakan dari tingkat produktivitas masing-masing faktor dan efisiensi pada tiap perusahaan. Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil marginal pekerja ($VMPP_L$) untuk setiap tenaga kerja. apabila jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak $OA = 200$ orang, maka nilai $VMPP_L$ sama dengan $MPP_L \times P = W_1$. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku (W), hal ini yang menjadikan laba perusahaan akan meningkat dengan menambah tenaga kerja baru.

Perusahaan dapat menambah keuntungan perusahaan dengan memperkerjakan orang hingga ON . Dalam titik N pengusaha mencapai keuntungan maksimum dan $VMPP_L$ sama dengan upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.

Penambahan tenaga kerja yang melebihi dari $0N$ (berada dititik $0B$) mengakibatkan keuntungan perusahaan menurun. Perusahaan akan membayar upah dalam tingkat yang berlaku (W) sedangkan $VMPP_L$ yang didapat hanya sebesar W_2 yang mana upah tersebut lebih kecil dari upah yang berlaku, maka dari itu penambahan pekerja lebih dari $0N$ dapat dilakukan apabila pengusaha yang bersangkutan mampu membayar upah di bawah upah yang sudah ditetapkan (W) atau sebagai pilihan lainnya yaitu dengan menaikkan harga jual barang.

2.1.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Sumarsono (2009, hlm. 182-183) menyatakan upah merupakan salah satu unsur yang menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena tidak tepatnya dalam menentukan besaran upah maka akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yakni:

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerja yang memerlukan keahlian tinggi dan jumlah tenaga kerja yang jarang, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan yang -memiliki penawaran yang banyak cenderung akan menurunkan tingkat upah.

2. Organisasi serikat buruh

Ada dan tidaknya organisasi serikat buruh serta kuat dan lemahnya organisasi ini akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan upah serta sebaliknya.

3. Kemampuan untuk membayar

Pemberian upah bergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah menjadi salah satu bagian biaya produksi, tingginya tingkat upah mengakibatkan tingginya biaya produksi yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas kinerja para karyawan. Semakin tinggi kinerja karyawan, maka semakin besar upah yang akan diterima. Kinerja karyawan ini dinyatakan sebagai produktivitas.

5. Biaya hidup

Hidup di kota-kota besar biasanya memerlukan biaya hidup yang lebih tinggi. Biaya hidup juga menjadi batas penerimaan upah dari karyawan.

6. Pemerintah

Pemerintah dengan perundang-undangan yang ditetapkan akan mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah menjadikan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.

2.1.4.4 Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan menjadi bagian dari bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Menurut Ahmad Supardi (2021, hlm. 23) di Indonesia terdapat beberapa cara untuk memperhitungkan besaran upah dan cara pembayarannya yakni:

1. Upah dan gaji

Sistem pemberian upah di Indonesia menggunakan gaji pokok berdasarkan pada pangkat dan masa kerja, maka penentuan gaji pokok didasarkan pada prinsip dari teori *human capital* yang menyatakan bahwa upah atau gaji pekerja diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Selain gaji pokok biasanya pekerja menerima berbagai macam tunjangan seperti: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dll.

2. Tunjangan dalam bentuk natura

Tunjangan yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk sembako (beras, gula, garam, dan lain-lain) dan pakaian yang diberikan kepada karyawan. Tujuan dari tunjangan dalam bentuk natura ini yaitu untuk menghindari karyawan dari permainan harga oleh pedagang, selanjutnya untuk menjamin kebutuhan primer dari karyawan untuk keluarganya.

3. *Fringe benefit*

Fringe benefit merupakan berbagai jenis keuntungan diluar gaji yang diterima oleh seseorang sehubungan dengan gaji dan jabatannya. *Fringe benefit* bisa berupa dana yang disisihkan oleh perusahaan sebagai dana pensiun, asuransi kesehatan, upah yang dibayar pada hari libur, cuti, sakit, rumah dinas, mobil dinas, dan lain sebagainya. Keuntungan ini berbeda macam dan jumlahnya, selain itu nilai tiap jenis setiap keuntungan yang diterima setiap orang susah untuk dihitung.

4. Kondisi lingkungan kerja

Perbaikan kondisi lingkungan kerja oleh perusahaan merupakan biaya tambahan perusahaan, maka dari itu meningkatkan *labour cost* per unit barang

yang diproduksi. Nilai yang diterima dalam bentuk kondisi lingkungan kerja tidak dianggap sebagai bagian dari penghasilan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.5.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM menjadi indikator dalam menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengelompokan apakah suatu negara termasuk kedalam negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015)

Menurut Mohammad Bhakti Setiawa dan Abdul Hakim (2013, hlm. 18) konsep IPM pertama kali dipublikasikan *United National Development Program* (UNDP) tahun 1996 yang kemudian berlanjut dalam setiap tahun. IPM diartikan sebagai *a process of enlarging people's choise* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.

Menurut UNDP (1995, hlm. 12) dalam Mohammad Bhakti Setiawan (2013, hlm. 20) IPM merupakan indikator komposit tunggal meskipun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capability*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mengartikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Empat hal utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

2.1.5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup. Berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang lahir hidup dalam satu generasi sampai mencapai umur tertentu.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca atau menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang

digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

4. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran perkapita dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan/riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli berbasis formula rao (purchasing power parity). Proses perhitungannya yakni sebagai berikut:

Pertama, dengan menghitung rata-rata pengeluaran perkapita dari Susenas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
- b. Hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap Provinsi Kabupaten/Kota.
- c. Hitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y_t') sama dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dikali 12 bulan dibagi seribu.

Kedua, menghitung rata-rata pengeluaran perkapita dengan harga konstan (riil) dengan menggunakan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y_t'}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Dimana Y_t^* merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012, Y_t' adalah rata-rata pengeluaran per kapita per tahun t dan $IHK_{(t,2012)}$ merupakan IHK tahun t dengan tahun dasar 2012.

Ketiga, menghitung Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Dimana P_i merupakan rata-rata harga komoditi i per satu satuan wilayah, V_i adalah total biaya yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah dan Q_i adalah total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah. Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, maka harga tersebut di peroleh dari IHK.

- b. Menghitung paritas daya beli (PPP) didapat dengan menggunakan rumus

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Dimana PPP_j merupakan paritas daya beli wilayah j , p_{ij} adalah harga komoditi i di Kabupaten/Kota j , p_{ik} adalah harga komoditas i di Jakarta Selatan dan m adalah jumlah komoditas.

Keempat, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{PPP}$$

Y_t^{**} merupakan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan dengan Y_t^* adalah rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012. Perhitungan paritas daya beli didasarkan atas 96 komoditas kebutuhan pokok, yakni 66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan.

Batas minimal dan maksimal dari perhitungan keempat komponen diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nilai Batas Maksimal dan Minimal Komponen Penyusun IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Lahir saat Hidup	Tahun	20	85
Harapan Lama sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.346	26.572.352

Sumber: penyusunan indeks manusia Badan Pusat Statistik (BPS).

Keterangan :

1. Penentuan nilai minimal dan maksimal menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global. Kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.
2. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua.
3. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksi hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta selatan Tahun 2025.

Sebelum masuk kedalam perhitungan indeks pembangunan manusia semua indeks dari dimensi dalam menyusun indeks pembangunan manusia harus dihitung terlebih dahulu. Adapun formula yang digunakan dalam menghitung indeks dari dimensi IPM tersebut adalah:

1. Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan : AHH = Angka harapan hidup saat lahir

2. Pendidikan

Dimensi pendidikan terdiri dari dua komponen yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Indeks dari kedua komponen tersebut diberi bobot yang sama dalam menyusun indeks pendidikan menjadi

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan : HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

3. Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Selanjutnya perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan menggunakan formula rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Indeks Pembangunan Manusia dihitung menggunakan rata-rata ukur geometrik dikarenakan rata-rata ukur geometrik ini lebih responsif dengan adanya ketimpangan capaian pembangunan, diman jika terdapat satu indikator yang rendah, maka indikator tersebut tidak akan tertutupi oleh indikator lain yang memiliki nilai yang tinggi.

Nilai IPM dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok untuk melihat pencapaian pembangunan manusia pada suatu wilayah. Kelompok nilai dalam IPM tersebut yaitu

1. Kelompok sangat tinggi : $IPM \geq 80$
2. Kelompok tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok rendah : $IPM < 60$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan beberapa wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah atau negara hal tersebut menunjukkan pencapaian pembangunan masyarakat daerah maupun negara tersebut semakin baik.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu akan mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian sebelumnya dan untuk membantu penelitian yang sedang dilaksanakan. Berikut uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. (Wisna Sarsi Tri, Sukirno Putro dan Lapeti sari 2014)	Independen - Tingkat Upah	Wisna, dkk: - Dependen - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penulis: - Independen - Aglomerasi Industri - Indeks pembangunan manusia Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian dengan metode deskriptif dan data regresi <i>estimasi ordinary least square</i> (OLS) menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau	Jom FEKOM: Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014
2.	Aglomerasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2010-2014. (Annisa Kusumasari dan Fitri Kartiasih,	Dependen - Pertumbuhan Ekonomi Independen - Aglomerasi Industri Modal Manusia	Dependen - Pertumbuhan Ekonomi Independen - Aglomerasi Industri Modal Manusia	Hasil penelitian dengan metode regresi data panel spasial menunjukkan terdapat delapan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang teraglomerasi secara industri dan semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	Jurnal aplikasi statistika dan komputasi statistika, Vol.9 No.2 2017, ISSN 2086-

	2017)				4132
3.	Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi : Peran Karakteristik Regional di Indonesia Periode 1994-2003. (Jamzan Sodik dan Sedi Iskandar, 2007)	Dependen - Pertumbuhan ekonomi Independen - Aglomerasi industri	Jamzah, dkk: Independen - Laju inflasi - Laju angkatan kerja - Laju <i>openness</i> (laju keterbukaan ekonomi) - <i>Human Capital</i> Penulis: Independen - Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Tingkat upah	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi dengan metode GLS (generalized Least Square) atau metode kuadrat kecil yang menghasilkan penaksiran linier dan tidak bias menunjukkan bahwa variable aglomerasi industri tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.8 No.2, Oktober 2007: 117-129
4.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (Eko wicaksono Pambudi dan Miyasto, 2013)	Dependen - Pertumbuhan ekonomi Independen - Aglomerasi industri	Eko, dkk: Independen - Investasi - Angkatan kerja Penulis: Independen - Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) - Tingkat upah - Indeks pembangunan manusia	Hasil penelitian menggunakan Metode panel data dengan 175 observasi menghasilkan Pengaruh variable yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi, angkatan kerja yang bekerja sedangkan aglomerasi dan <i>human capital investment</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Diponegoro Journal Of Economic , Vol. 2, No. 2, 2013
5.	<i>The Economic Growth and The Regional Characteristics : The Case Of Indonesia</i> (Yesi	Dependen - Pertumbuhan ekonomi	Yesi, dkk: Independen - Laju pertumbuhan angkatan kerja - Laju	Hasil penelitian dengan analisis panel data di 33 Provinsi menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan ekspor bersih secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi	Buletin ekonomi moneter dan perbankan, 2014, pp. 3-18,

	Hendriani Supartoyo, Jen Tatum dan Recky H. E Sendouw, 2013)		<p>pertumbuhan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laju pertumbuhan modal manusia - Laju pertumbuhan inflasi dan ekspor netto <p>Penulis Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aglomerasi industri - Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) - Tingkat upah - Indeks pembangunan manusia 	dan modal manusia yang ditemukan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi	ISSN 1410-8046
6.	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, 2013)	Independen Indeks Pembangunan Manusia	<p>Mohammad Bhakti, dkk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independen - Desentralisasi Pemerintah - Produk Domestik Bruto - Pajak Pendapatan <p>Penulis Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aglomerasi industri - Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) - Tingkat upah 	Hasil penelitian dengan menggunakan <i>Error Correction Model (ECM)</i> , menunjukkan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek.. estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM sedangkan krisis ekonomi tahun 1997 tidak berpengaruh terhadap IPM	Jurnal <i>Economia</i> , Vol. 1 No.2, April 2013
7.	Analisis Pengaruh Indeks	Independen: Indeks Pembangunan	Yulia, dkk: Independen Tingkat Upah	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis <i>Vector regression (VAR)</i>	Jurnal ilmiah mahasiswa

	Pembangunan Manusia (Ipm), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak), Dan Pengerluan Pemerintah Di Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1995-2017. (Yulia Octavia Rahmawati dan Nugroho Suryo, 2019)	n Manusia - Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi	- Pengeluaran Pemerintah Penulis: Independen - Aglomerasi Industri	menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.	a Feb, Universitas Brawijaya, Vol. 7 No.2, Mei 2019
8.	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. (Alvy Kusumawati, Wiwin Priana dan Muhammad Wahed, 2021)	Independen: - Indeks Pembangunan Manusia Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi	Alvy, dkk: Independen - Pengangguran - Kemiskinan Penulis: - Aglomerasi Industri - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Tingkat Upah	Hasil penelitian dengan menggunakan Model Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 2, November 2021, 188-122
9.	Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri,	Independen - Aglomerasi Industri Dependen	Melantika, dkk: Independen - Angkatan	Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan model <i>fixed effect model</i> menunjukkan	Jurnal Akuntansi dan Pajak,

	Angkatan Kerja, Dan Human Capital Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 (Melantika Destya Windasari, Suhesti Ningsih dan Yuwita Ariessa, 2021)	- Pertumbuhan Ekonomi	Kerja - <i>Human Capital Investment</i> Penulis: Independen - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Tingkat upah - Indeks Pembangunan Manusia	secara simultan aglomerasi industri, angkatan kerja dan <i>human capital investment</i> memiliki hasil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, namun secara parsial aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sedangkan angkatan kerja dan <i>human capital investment</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Tengah.	2021, Vol. 22 No. 01, ISSN 2579-3055
10.	Pengaruh Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. (Yusuf Raynaldhi, 2016)	Independen - Indeks Pembangunan Manusia Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Yusuf: Independen - Angka Harapan Hidup (AHH) - Konsumsi Perkapita (PPP) - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Angka Melek Huruf (AMH) Penulis Independen - Tingkat Partisipasi angkatan Kerja - Tingkat upah - Aglomerasi Industri	Hasil penelitian dengan metode regresi data panel menunjukkan komponen AHH, PPP, AMH dan RLS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Komponen AHH memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi namun kedua indikator pendidikan yaitu AMH dan RLS memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan komponen PPP memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Imilah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Vol. 4 No. 2, Mei 2016
11.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan	Independen - Indeks Pembangunan Manusia	Asnidar: Independen - Inflasi Penulis:	Hasil penelitian dengan persamaan regresi berganda menunjukkan Indeks Pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh tidak	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2 No. 1,

	Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. (Asnidar, 2018)	Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Independen - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Tingkat Upah - Aglomerasi Industri	signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur namun secara simultan indeks pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh timur.	April 2018
12.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh 2008-2019. (Farathika Putri Utami, 2020)	Independen - Indeks pembangunan Manusia Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Farathika: Independen - Kemiskinan - Pengangguran Penulis: Independen - Aglomerasi Industri - Tingka Partisipasi Angkatan Kerja - Tingkat Upah	Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan secara bersama-sama indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.	Jurnal Samudera Ekonomi ka, Vol. 4 No. 2, September 2020, ISSN 2685-4287
13.	Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. (Rini Sulistiawati, 2012)	Independen - Tingkat Upah	Rini: Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja - Kesejahteraan Masyarakat Penulis: Independen - Tingkat Partisipasi Ngkatan Kerja - Aglomerasi Industri - Indeks Pembangunan Manusia Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian dengan menggunakan data panel menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan produktivitas rendah yang umumnya menyerap sektor primer. Penyerapan tenaga kerja memiliki hasil positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial.	Jurnal Eksos, Vol. 8 No. 3, Oktober 2012, ISSN 1693-9093

14.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi Di Kabupaten Bandung Barat. (Shafira Putri Salsabila, Budi Santosa dan Soeharjo, 2020)	Independen - Indeks Pembangunan Manusia	Shafira, dkk: Independen - Pertumbuhan Ekonomi - Populasi Dependen - Aglomerasi Industri Penulis: Independen - Aglomerasi Industri - Tingkat Upah - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dependen - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap aglomerasi industri, sedangkan indeks pembangunan manusia dan populasi memiliki efek positif terhadap aglomerasi. Dari hasil didapat terdapat 3 kecamatan yang mengalami aglomerasi yaitu, Kec. Lembang, Kec. Ngamparrang dan Kec. Padalarang.	Media Ekonomi, Vol. 27 No. 2, Oktober 2019. ISSN 2442-9686
-----	---	--	---	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep dari sebuah penalaran yang mampu memberikan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah di jelaskan. Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai konsep yang menggambarkan sebuah persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara aglomerasi industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), upah minimum kabupaten/kota dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat periode 2005-2018.

2.2.1 Hubungan Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan ekonomi

Aglomerasi industri merupakan sekumpulan kluster industri yang terfokus akibat aktifitas ekonomi penduduk secara spasial. Terpusatnya kegiatan ekonomi industri disuatu wilayah memberikan penawaran berbagai kelebihan dalam bentuk produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. Kelebihan aglomerasi dalam bentuk produktivitas dan pendapatan memiliki kaitan dengan penghematan skala (*scale economies*) dan penghematan biaya. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan yang tinggi akan menarik investasi berupa teknologi baru guna menambah produktivitas barang atau jasa suatu industri.

Aglomerasi industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan aglomerasi industri membentuk pola konsumsi yang berbeda disetiap daerah, sehingga berkembangnya industri pada daerah tersebut dapat mempengaruhi daerah yang lain. Aglomerasi Industri juga mengakibatkan bersatunya faktor-faktor industri yang berpusat pada wilayah tertentu dan membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Dwi Cahya (2018, hlm. 40) aglomerasi industri akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian, karena aglomerasi industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antara daerah, sehingga perkembangan industri daerah tersebut akan mempengaruhi daerah lainnya. Aglomerasi industri juga mengakibatkan berkumpulnya faktor-faktor industri yang terkonsentrasi diwilayah tertentu yang membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

2.2.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut didasari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan apabila jumlah dan kualitas dari tenaga kerja itu baik. Menurut Sadono Sukirno (2004: 429) dengan kualitas penduduk dan tenaga kerja yang baik maka akan menghasilkan angkatan kerja yang bermutu pula. Dengan adanya penambahan penduduk, dapat menaikkan jumlah tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan hasil produksi yang lebih banyak.

Menurut Arsyad (1997) dalam Dwi Cahya (2018, hlm. 47) penambahan penduduk dan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin meningkatnya tenaga kerja berarti semakin produktif tenaga kerja tersebut, sedangkan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka potensi dasar domestik juga akan meningkat. Namun hal tersebut kembali kepada kemampuan sistem ekonomi dalam menyerap dan memperkejakan tambahan pekerja secara produktif, kemampuan ini bergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Bertambahnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan total produksi pada suatu daerah. Peningkatan total produktivitas pada suatu daerah menjadikan salah satu alat ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2013) dan Hasanah

(2016) yang mengatakan bahwa peningkatan angkatan kerja berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Hubungan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Upah menjadi sumber penghasilan utama bagi seseorang, maka dari itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak karyawan. Untuk menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan hidup telah terpenuhi dapat dilihat dari perolehan penghasilan. Penghasilan karyawan yang baik dapat menjaga daya beli penduduk akibat kenaikan harga dan berkembangnya produktivitas kerja karyawan dalam suatu perusahaan yang berbebrak dalam bidang jasa maupun barang.

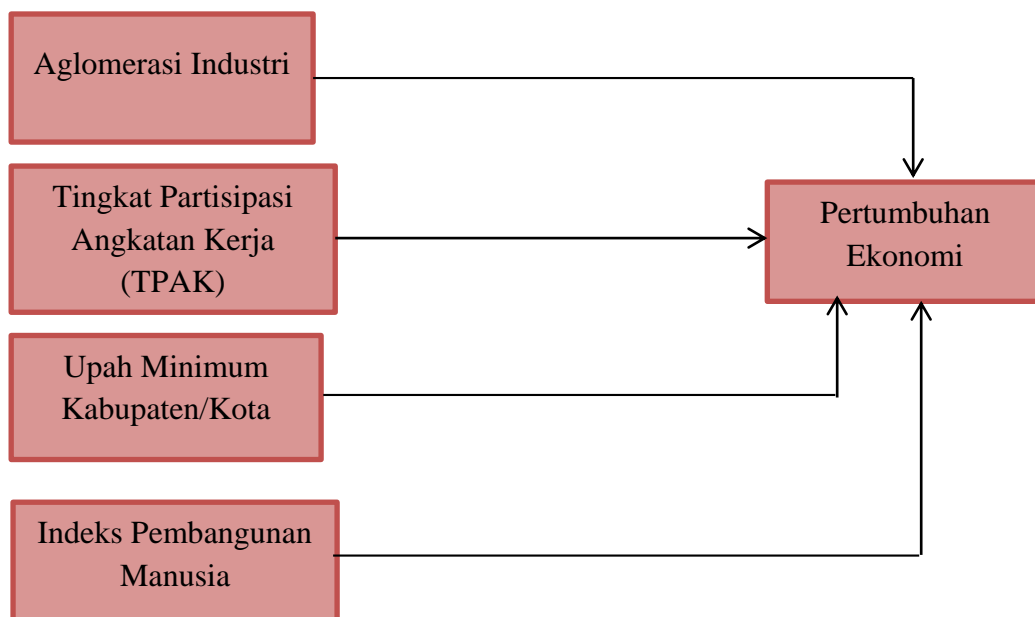
Besarnya penghasilan atau upah menjadikan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pendapatan individu yang bertambah, peningkatan produktivitas pekerja dan meningkatkan kegiatan produksi perusahaan dengan cara produksi yang efisien. Sehingga semakin tinggi tingkat upah tenaga kerja maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara optimal dengan dukungan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang baik. Selain itu dengan adanya lonjakan penduduk akan mengakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dikemudian hari memungkinkan adanya tambahan produktivitas yang lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih baik. Proses peningkatan angkatan kerja tidak terlepas dari sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik

pada suatu daerah, hal ini disebabkan sumber daya manusia yang baik dari segi pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan hidup yang layak akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas untuk melakukan kegiatan ekonomi secara maksimal diberbagai sektor. Berdasarkan hasil yang di temukan oleh Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim (2013, hlm. 23-24) PDB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan penduduk.

Pada gambar 2.2 dibawah dapat dilihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang akan diteliti dalam penelitian ini



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2005-2020.
2. Diduga secara bersama-sama Aglomerasi Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Upah dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2005-2020.